



FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN BOJONGSOANG DALAM MENGURANGI RESIKO DAN MITIGASI BENCANA BANJIR PADA KAWASAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

¹Ariel Ragawilafa, ²Medi Mahendra

1, 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale
Bandung, Jawa Barat

Email: arielragawilafa27@gmail.com

Received 1 September 2025; Revised: 3 September 2023; Accepted: 7 September 2023; Published: 30 September 2025; Available online: September 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana di kawasan permukiman Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, tahun 2024. Latar belakang penelitian adalah tingginya frekuensi bencana, khususnya banjir, yang berdampak signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori. Data diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelayanan pemerintah dalam mitigasi bencana berjalan cukup baik melalui penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, fungsi pemberdayaan masyarakat masih terkendala keterbatasan sarana prasarana dan partisipasi yang belum merata. Kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana mulai tumbuh, tetapi belum optimal. Penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara simultan untuk memperkuat sistem mitigasi bencana berkelanjutan. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan sistem peringatan dini, peningkatan fasilitas mitigasi, serta edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Optimalisasi kedua fungsi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana.

Kata Kunci: Fungsi Pemerintah, Mitigasi Bencana, Kecamatan

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Bojongsoang Subdistrict Government in disaster risk reduction and mitigation efforts in the residential areas of Bojongsoang Subdistrict, Bandung Regency, in 2024. The background of this study is the high frequency of disasters, particularly floods, which have a significant impact on the safety and welfare of the community. The research uses a qualitative method with an explanatory case study approach. Data were obtained through purposive sampling techniques involving interviews, observation, and documentation. The results show that the government's service function in disaster mitigation is working quite well through the provision of an early warning system, the construction of flood control infrastructure, and coordination with relevant agencies. However, community empowerment functions are still constrained by limited infrastructure and uneven participation. Community awareness of disaster risk reduction efforts is growing but is not yet optimal. The study concludes that improving the quality of services and community empowerment needs to be done simultaneously to strengthen a sustainable disaster mitigation system. The recommendations proposed include strengthening the early warning system, improving mitigation facilities, and educating and raising

public awareness about disasters. Optimizing these two functions is expected to create a safer and more resilient residential environment in the face of disasters.

Keywords: Government Functions, Disaster Mitigation, Subdistrict

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi (Melianita, 2021). Permukiman masyarakat yang tumbuh pesat di wilayah-wilayah rawan bencana kerap kali tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan risiko bencana (Aning Haryati, 2023). Upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana, khususnya di kawasan permukiman, menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keamanan, keselamatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat (Aprilia Fitri Pamungkas, 2024).

Menurut Suwaryo, Yuwono Bencana merupakan suatu proses alam atau bukan alam yang menyebabkan korban jiwa, harta dan mengganggu tatanan kehidupan, sedangkan Bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian di luar kenormalan yang merusak atau mengganggu kehidupan manusia sehingga menimbulkan dampak kerugian atau korban yang melebihi kemampuan masyarakat setempat untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan sumber daya sendiri.

Bencana menimbulkan banyak kerugian kejadiannya meningkat cepat selama beberapa dekade terakhir, besaran kerugian yang

disebabkan oleh bencana alam berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia tergantung intensitas dan frekuensi kejadian bencana serta kerentanan dan kapasitas masyarakatnya.

Terdapat 3 jenis bencana menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 yaitu :

1. Bencana alam merupakan peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan, tsunami dan gunung meletus;
2. Bencana non merupakan peristiwa non alam seperti wabah penyakit, gagal modernisasi dan gagal teknologi;
3. Bencana sosial merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh manusia (anthropogene) seperti konflik sosial antar kelompok masyarakat.

Menurut Al Halik, (Muhamad Firman Al Halik, 2022) Jawa Barat Merupakan Provinsi yang memiliki kejadian Bencana alam cukup banyak, diantaranya Bencana alam tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin putting beliung, kebakaran, dan sebagainya. Dari data Badan Pusat Statistik, (2023), Provinsi Jawa Barat jadi salah satu wilayah dengan kejadian bencana alam paling tertinggi dibandingkan Provinsi lainnya, seperti, Gempa bumi 13 kali, Tanah Longsor 185 kali, Banjir 107

kali, Kekeringan 61 kali, Kebakaran Hutan dan Lahan 152 kali, Cuaca Ekstrem 326 kali. Ini sangat jauh di bandingkan dengan Provinsi Papua Tengah Dengan Jumlah 1 Bencana yaitu Kekeringan.

Jawa Barat terletak wilayah yang rentan terjadi bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana adalah kejadian yang kira-kira terjadi dan di desain untuk mengelola kejadian yang penanggulangannya tidak tepat (Sugeng Yulianto, 2021). Gambaran risiko bencana di Indonesia juga diidentifikasi oleh BNPB dalam buku RBI (Risiko Bencana Indonesia) dengan berbagai macam kajian risiko bencana alam di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan risiko bencana pada kawasan permukiman membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar upaya mitigasi dapat diimplementasikan secara efektif, Mitigasi bencana melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya. Dua pendekatan utama dalam mitigasi bencana adalah mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural (Yunus Aris Wibowo, 2019). Mitigasi struktural mencakup tindakan fisik yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana dengan memodifikasi atau memperkuat struktur fisik dan infrastruktur (Urbanus, 2021).

Mitigasi struktural berfokus pada perlindungan fisik dan infrastruktur serta pengurangan risiko dengan membangun sesuatu yang lebih kuat dan aman, beberapa contoh mitigasi struktural meliputi diantaranya adalah membangun kontruksi bangunan tahan gempa yaitu membangun atau memperkuat bangunan dan infrastruktur agar lebih tahan terhadap gempa bumi, membangun bendungan dan tanggul untuk mengontrol banjir atau melindungi daerah beresiko banjir, reboisasi yaitu melakukan penanaman kembali pohon-pohon untuk mencegah erosi tanah dan tanah longsor, membangun pelabuhan dan bangunan tangguh badai untuk mengurangi risiko terhadap badai tropis, dan membangun sistem peringatan dini untuk memberi tahu masyarakat tentang potensi ancaman bencana, seperti tsunami, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah evakuasi yang tepat.

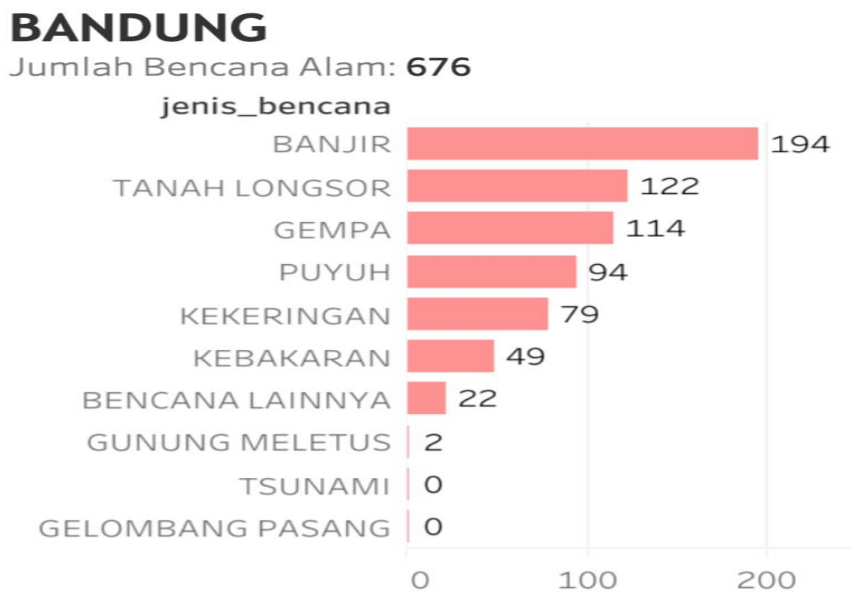
Pendekatan mitigasi non-struktural mencakup tindakan yang tidak melibatkan perubahan fisik pada bangunan atau infrastruktur, melainkan berfokus pada perubahan perilaku, pendidikan, peningkatan kesadaran, serta pengaturan kebijakan (Sitti Hadhira Khairina, 2024). Beberapa contoh kebijakan mitigasi non-struktural antara lain: pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal bencana serta memahami langkah respons yang tepat; perencanaan tata ruang yang aman dengan melarang pembangunan permukiman di daerah berisiko banjir atau longsor;

penerapan kebijakan dan regulasi yang memperketat standar bangunan tahan gempa serta mengatur penggunaan lahan di wilayah rawan bencana; serta edukasi evakuasi yang melatih masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan evakuasi secara aman saat bencana terjadi. Dukungan kebijakan dan koordinasi yang terintegrasi menjadi unsur kunci dalam mengurangi risiko bencana melalui pendekatan mitigasi, baik struktural maupun non-struktural.

Berdasarkan uraian tersebut, tantangan utama dalam upaya

pengurangan risiko dan mitigasi bencana di kawasan permukiman terletak pada kualitas sinergi kelembagaan dan keberdayaan masyarakat yang berkesinambungan (Abd Haris, 2023). Kondisi ini semakin penting di wilayah Bandung bagian selatan yang dinilai lebih sering terdampak bencana, terutama banjir. Kerusakan tutupan hutan di kawasan tersebut mengakibatkan berkurangnya daya resap air hujan sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir dan longsor.

Gambar 1 Data Bencana di Bandung



Sumber : Open Data Jawa Barat, 2021

Berdasarkan Open Data Jabar, (2021) bahwa Bandung mengalami bencana sebanyak 676 kali terbesar dari kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Meliputi bencana yang tertinggi yaitu bencana Banjir. Dukungan kebijakan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai pemicu partisipasi aktif masyarakat, sehingga

membentuk jejaring yang solid dalam mengurangi dampak bencana secara berkelanjutan (Ritonga, 2024). (Sunarto, 2024). Dengan demikian, pengurangan risiko dan mitigasi bencana di kawasan permukiman pada tingkat kecamatan

memerlukan perhatian serius terhadap penguatan koordinasi kelembagaan, optimalisasi Peran Pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat, agar tercipta sistem perlindungan yang holistik dan berdaya tahan tinggi terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

Pengurangan risiko dan mitigasi bencana pada kawasan permukiman merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana yang kerap terjadi, seperti banjir, tanah longsor, maupun bencana lainnya. Dalam konteks permukiman di tingkat kecamatan, kerentanan lingkungan serta dinamika pertumbuhan kawasan yang pesat membutuhkan pengelolaan yang cermat dan terencana agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin (Turniningtyas Ayu Rachmawati, 2018).

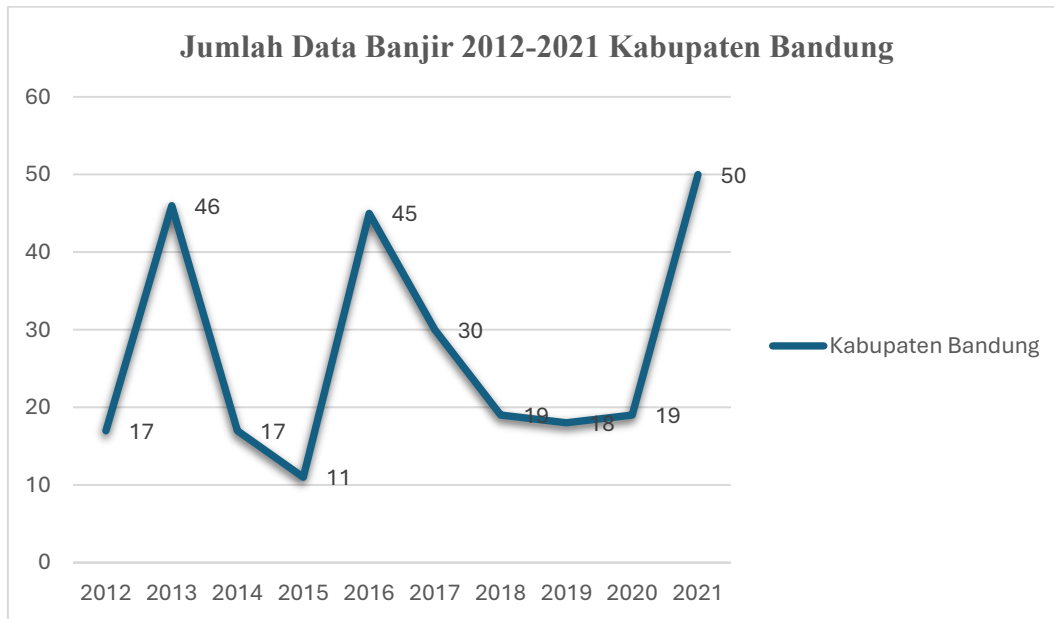
Fenomena tingginya risiko bencana pada kawasan permukiman di Bandung bagian selatan yaitu di Kecamatan Bojongsoang tidak terlepas dari karakteristik tata ruang yang padat, lemahnya sistem drainase, serta kurangnya sosialisasi mengenai penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Kerentanan ini semakin diperparah oleh alih fungsi lahan dan rendahnya keterlibatan komunitas dalam menjaga lingkungan, sehingga risiko menjadi lebih sulit dikendalikan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tindakan preventif sering kali belum optimal,

yang menyebabkan upaya mitigasi berjalan kurang efektif. Pendekatan pengurangan risiko secara terkoordinasi di tingkat lokal membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, sehingga sistem perlindungan yang dibangun mampu merespon ancaman bencana secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pengelolaan kawasan permukiman yang rentan bencana menuntut adanya strategi komprehensif guna mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Menurut data BPBD Jabar, (2025) salah satu contoh nyata adalah peristiwa banjir yang terjadi pada 12 Maret 2025 di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah Bandung Raya. Kejadian banjir tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi di kawasan ini. Sebelumnya, pada November 2021, banjir melanda Kecamatan Bojongsoang akibat luapan Sungai Citarum, yang menyebabkan kawasan ini terendam hingga 701,54 hektar. Di samping itu pada Maret 2016 banjir juga melanda Desa Bojongsoang, mengakibatkan 12 warga mengungsi dan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Banjir yang terjadi di Kecamatan Bojongsoang telah menjadi fenomena berulang yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, data historis menunjukkan bahwa banjir di kawasan ini terjadi hampir setiap tahun dan menimbulkan kerugian material

serta mengancam keselamatan warga. (Kompas.com, 2016; reliefweb.int, 2016; Tempo.com, 2024).

Gambar 2 Bagan Data Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Pertahun



Sumber: Open Data Jabar, 2024

Data menunjukkan bahwa banjir di Kabupaten Bandung merupakan bencana dengan frekuensi tinggi dan pola kejadian yang fluktuatif. Pada tahun 2012 tercatat 17 kejadian banjir, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2013 dengan 46 kejadian. Setelah itu, jumlah kejadian sempat menurun pada 2014 (17 kejadian) dan mencapai titik terendah pada 2015 dengan 11 kejadian. Namun pada 2016, banjir kembali melonjak menjadi 45 kejadian, hampir menyamai lonjakan 2013.

Periode 2017-2020 relatif lebih stabil dengan jumlah kejadian berkisar antara 18-30 kejadian per tahun. Meskipun demikian, pada 2021 kembali terjadi lonjakan besar hingga mencapai 50 kejadian, menjadikannya tahun dengan intensitas banjir tertinggi selama periode pengamatan.

Fluktuasi ini mencerminkan tingginya kerentanan Kabupaten Bandung terhadap banjir, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, kerusakan lingkungan seperti berkurangnya tutupan hutan dan daerah resapan, serta intensitas curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim. Lonjakan besar pada 2013, 2016, dan 2021 menunjukkan lemahnya sistem pengendalian banjir, baik dari aspek infrastruktur maupun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan pentingnya strategi mitigasi banjir yang lebih terencana dan berkesinambungan, melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penguatan sistem peringatan dini, pengaturan tata ruang yang lebih ketat, serta pemberdayaan masyarakat dalam

menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Perlu dituliskan juga, bahwa kecamatan Bojongsoang berada di lokasi strategis yang menarik sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Bandung yang tentunya sebagai perbatasan menjadi salah satu akses masyarakat Jawa Barat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari yang juga termasuk kedalam wilayah rencana bencana banjir hal itu disebabkan lokasi geografis Kecamatan Bojongsoang yang menghadapi tekanan pembangunan yang pesat dalam bidang pemukiman dan infrastruktur.

Namun, pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kemampuan lingkungan menyebabkan banyak masalah, salah satunya adalah peningkatan kemungkinan bencana banjir. Kondisi tersebut lebih buruk karena alih fungsi lahan, kurangnya area resapan air, dan sistem drainase yang buruk. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan yang cepat tanpa perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, terutama di daerah perbatasan kota seperti Kecamatan Bojongsoang.

Dalam konteks ini, peran kecamatan menjadi sangat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menegaskan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, termasuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

serta pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini memberi landasan hukum bagi kecamatan untuk tidak hanya bertindak sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam mengkoordinasikan upaya mitigasi bencana di tingkat lokal. Dengan kewenangan tersebut, Kecamatan Bojongsoang memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan, pengawasan tata ruang, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka menekan risiko banjir yang terus berulang.

Kemudian alasan peneliti memilih lokus penelitian di kecamatan Bojongsoang yaitu faktor utamanya Kecamatan Bojongsoang Pemerintah Kecamatan Bojongsoang menghadapi tantangan serius dalam fungsi pelayanan mitigasi bencana. Kualitas pelayanan publik dinilai belum optimal, terlihat dari rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Sarana dan prasarana pendukung seperti sistem peringatan dini dan infrastruktur tangguh bencana masih kurang memadai. Selain itu, data masyarakat rentan di kawasan rawan bencana belum diperbarui secara berkala, sementara pemetaan risiko belum mencakup seluruh permukiman padat penduduk. Masalah ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta sinergi yang belum optimal dengan BPBD dan dinas terkait dalam penyusunan rencana kontinjensi.

Ada aspek pemberdayaan, partisipasi masyarakat dalam

program pelatihan dan simulasi bencana masih sangat rendah akibat minimnya kesadaran tentang pentingnya mitigasi mandiri. Program pelatihan desa tangguh bencana belum menjangkau seluruh RW rawan bencana, sementara pemberdayaan ekonomi pasca bencana belum berjalan efektif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan LSM pun belum dimanfaatkan secara maksimal, ditandai dengan pembentukan kelompok siaga bencana yang belum merata di semua wilayah. Hal ini menunjukkan adanya gap antara potensi sumber daya dan implementasi di lapangan

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori. Pendekatan ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan (Widiyaningrum & Riaji, 2023), khususnya fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam mengurangi risiko dan melakukan mitigasi bencana banjir di kawasan pemukiman Kabupaten Bandung tahun 2024. Penelitian kualitatif berfokus pada upaya menggambarkan realitas sosial secara holistik melalui deskripsi kata-kata dalam konteks alamiah (Ubay Haki, 2024). Sementara itu, pendekatan studi kasus eksplanatori sebagaimana dijelaskan oleh Yin dalam (Fiantika, 2022), digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, sehingga relevan dalam menjelaskan secara faktual praktik dan kebijakan

pemerintah kecamatan dalam penanggulangan banjir.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Asrulla, 2023). Informan terdiri atas pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung, seperti Camat Bojongsoang, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Sosial Budaya, Kepala Desa Bojongsoang, Kepala Desa Bojongsari, Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat dan warga terdampak banjir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif moderat, dan dokumentasi (Siti Romdona, 2025). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam terkait peran pemerintah kecamatan, observasi digunakan untuk mengamati kondisi lapangan secara langsung (Nikmah, 2023), sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, dan dokumen resmi yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Arjuna Yahdil Fauza Rambe, 2020). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan tema penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel agar hasil penelitian lebih terstruktur, sementara penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas fungsi pemerintah kecamatan dalam mengurangi risiko serta melakukan mitigasi bencana banjir. Proses analisis dilakukan secara berulang agar hasil penelitian bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Primer (Pelayanan) Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam Mengurangi Risiko dan Mitigasi Bencana Banjir Pada Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2024

Menurut Taliziduhu Ndraha (Labolo, 2023) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer (pelayanan) dan fungsi sekunder (pemberdayaan). Fungsi primer menekankan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang tidak diprivatisasi, termasuk layanan keamanan, birokrasi, dan pelayanan sipil. Dalam konteks mitigasi bencana, fungsi pelayanan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan layanan cepat ketika menghadapi ancaman bencana.

Pemerintah Kecamatan Bojongsoang melaksanakan fungsi pelayanan tersebut melalui penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penyelenggaraan

posko darurat, serta koordinasi lintas instansi saat bencana terjadi. Camat Bojongsoang, Kankan Taufik, menjelaskan bahwa ketika bencana melanda, kecamatan segera berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial serta turun langsung ke lapangan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan berperan sebagai garda terdepan pelayanan publik dalam kondisi darurat, memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain koordinasi administratif, kecamatan juga terlibat langsung dalam operasi lapangan seperti monitoring, pendataan dapur umum, dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Keterlibatan ini menegaskan bahwa fungsi pelayanan pemerintah tidak berhenti pada tataran koordinasi, tetapi juga mencakup empati sosial dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, fungsi primer Pemerintah Kecamatan Bojongsoang menjadi kunci dalam mitigasi bencana – menghubungkan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil warga – sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko banjir

Tabel 1. Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi

Desa/Kelurahan	Sistem Peringatan Dini Bencana alam	Sistem Peringatan dini Khusus Tsunami	Perlengkapan Keselaman
----------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Bojongsari	Ada	Tidak ada	Ada
Bojongsoang	Ada	Tidak ada	Ada
Lengkong	Ada	Tidak ada	Ada
Cipagalo	Ada	Tidak ada	Ada
Buah Batu	Ada	Tidak ada	Ada
Tegaluar	Ada	Tidak ada	Ada

Sumber: BPS, 2025

Terlihat pada tabel di atas, bahwa kesiapan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang juga tercermin dari kesiapan enam desa/kelurahan Bojongsari, Bojongsoang, Lengkong, Cipagalo, Buah Batu, dan Tegaluar yang telah memiliki sistem peringatan dini dan perlengkapan keselamatan dasar. Namun, belum ada sistem peringatan dini untuk bencana tsunami, menandakan fokus kesiapsiagaan

diarahkan pada ancaman lokal seperti banjir yang paling sering terjadi. Upaya mitigasi ini juga ditopang oleh dukungan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2023, BPBD Kabupaten Bandung mengalokasikan sekitar Rp26 miliar untuk program penanggulangan bencana, dengan fokus pada pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pascabencana.

Tabel 2. Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2023

Tabel 2. Rekrutasi Anggaran DIBD Kabupaten Bandung Tahun 2023				
No	Program	Kegiatan Utama	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	Mendukung operasional perangkat daerah
2	Penanggulangan & Mitigasi Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	627.000.000	Edukasi dan sosialisasi kebencanaan
		Pencegahan & Kesiapsiagaan (pelatihan, sarana, kapasitas, pascabencana)	11.568.351.795	Fokus utama mitigasi dan pelatihan
		Penyelamatan & Evakuasi (logistik, pencarian, pertolongan)	1.995.525.000	Tanggap darurat dan evakuasi
Total			14.151.976.795	

Alokasi anggaran ini menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi mitigasi di tingkat kecamatan. Pada tahun 2024, diselenggarakan kegiatan “Waspada Sejak Dini: Membangun Budaya Siaga Bencana di Kecamatan Bojongsoang” dengan anggaran

Rp28,68 juta untuk 100 peserta, sementara tahun 2025 dilanjutkan dengan tema “Siaga dan Tangguh: Memperkuat Peran Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana” dengan anggaran Rp14,96 juta untuk 66 peserta.

Tabel 3. Sosialisasi “Waspada Sejak Dini” Tahun 2024

Komponen	Uraian
Anggaran	Rp28.686.000
Peserta	100 orang
Tema	“Waspada Sejak Dini: Membangun Budaya Siaga Bencana”

Materi	Risiko bencana lokal, pencegahan banjir, pengelolaan sampah, kesiapsiagaan puting beliung, tindakan darurat
Metode	Ceramah, video edukasi, simulasi lapangan, brosur

Tabel 4. Sosialisasi “Siaga dan Tangguh” Tahun 2025

Komponen	Uraian
Anggaran	Rp14.961.300
Peserta	66 orang
Tema	“Siaga dan Tangguh: Memperkuat Peran Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana”
Materi	Evaluasi kegiatan, pelatihan banjir, pengelolaan sampah komunitas, forum siaga bencana
Metode	Workshop, simulasi, monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini memperlihatkan kesinambungan antara edukasi dan pemberdayaan, dari peningkatan kesadaran masyarakat pada 2024 hingga pembentukan komunitas tangguh bencana pada 2025. Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa pelayanan mitigasi dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala pada ketersediaan sarana dan kesiapan infrastruktur.

Sinergi lintas lembaga juga tampak jelas melalui kerja sama antara Kecamatan Bojongsoang, BPBD, Dinas Sosial, LSM, dan masyarakat dalam penanganan banjir serta edukasi kesiapsiagaan. Kolaborasi ini memperkuat pelaksanaan fungsi primer pemerintah dalam pelayanan publik, sebagaimana teori Taliziduhu Ndraha yang menekankan efektivitas dan kemanfaatan pelayanan publik. Upaya seperti pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat), pembangunan Sistem Peringatan Dini bekerja sama dengan Telkom University, dan inovasi BERLAGA (Bersih Drainase dan Pengendalian Genangan Air) menunjukkan

implementasi nyata mitigasi berbasis data dan partisipasi warga.

Dengan demikian, fungsi pelayanan Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam mengurangi risiko dan mitigasi bencana telah berjalan cukup efektif, dengan pendekatan kolaboratif, berbasis data, serta partisipasi aktif masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan konsistensi data drainase, arah kebijakan dan inovasi yang dilakukan sudah sejalan dengan standar normatif mitigasi bencana di Indonesia.

Fungsi Sekunder (Pemberdayaan) Pemerintah Kecamatan Bojongsoang Dalam Mengurangi Risiko dan Mitigasi Bencana banjir Pada Kawasan Permukiman di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2024

Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Bojongsoang sejalan dengan konsep Taliziduhu Ndraha tentang *empowering* (memberi kesempatan) dan *enabling* (memberi dukungan). Pemerintah kecamatan telah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur melalui pembentukan kelompok

siaga bencana, pelatihan, serta simulasi kebencanaan yang melibatkan Linmas, Satpol PP, LSM, dan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Camat Bojongsoang, upaya pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kemampuan aparatur dan Linmas agar mampu merespons cepat setiap kejadian bencana, mengumpulkan data kebutuhan masyarakat, serta segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Kegiatan gotong royong bersama seperti pengerukan sedimentasi sungai dan pembersihan saluran air juga menjadi bentuk nyata pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi lintas pihak.

Wawancara dengan Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Bojongsoang, Ibu Nike Yulistika, menunjukkan bahwa pemberdayaan

tidak berhenti pada kegiatan fisik, melainkan juga mencakup edukasi preventif kepada masyarakat tentang langkah-langkah menghadapi bencana. Masyarakat dilatih agar memahami tindakan preventif seperti penggunaan alat pemadam kebakaran, evakuasi, hingga pelaporan kondisi darurat. Selain itu, koordinasi dan sinergi antar lembaga seperti BPBD, PMI, Disperkimtan, dan Dinas Kebakaran menjadi bagian penting dari pendekatan *Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR)* yang menekankan kolaborasi multi pihak serta partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini, kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan efektif.

Gambar 3. Dokumentasi Pemerbayaan Masyarakat bersama dengan Limnas, LSM serta Aparatur Kecamatan melalui Gerakan Supersol Gotong Royong



Sumber: jurnalgaya.pikiran-rakyat.com, 2024

Meskipun fungsi pemberdayaan telah berjalan baik dalam aspek *empowering* dan *enabling*, masih terdapat kendala pada keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya partisipasi masyarakat. Namun demikian, pola

kemitraan antara pemerintah dan masyarakat di Bojongsoang menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama. Harapan masyarakat ke depan adalah penguatan komitmen

pemerintah dalam penyediaan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini yang efektif, serta keberlanjutan pendampingan. Dengan demikian, fungsi sekunder pemerintah dalam bentuk pemberdayaan di Kecamatan Bojongsoang telah berjalan sesuai teori Ndraha dan kebijakan nasional Destana, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi Pemerintah Kecamatan Bojongsoang dalam mengurangi risiko dan mitigasi bencana pada kawasan permukiman tahun 2024 menunjukkan bahwa kedua fungsi utama pelayanan dan pemberdayaan telah berjalan dengan baik, meskipun capaian efektivitasnya berbeda. Fungsi pelayanan dinilai lebih optimal karena masyarakat langsung merasakan manfaatnya, seperti kemudahan akses informasi, pelayanan darurat, serta koordinasi cepat antarinstansi saat bencana terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Bojongsoang telah berjalan sesuai dengan prinsip ketepatan dan kepuasan masyarakat.

Sementara itu, fungsi pemberdayaan menunjukkan hasil yang positif dari sisi partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Pemerintah Kecamatan Bojongsoang telah melibatkan masyarakat melalui pelatihan, pembentukan tim siaga bencana, serta kegiatan gotong

royong lintas pihak. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan pemerataan partisipasi, sehingga pemberdayaan belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, optimalisasi kedua fungsi ini perlu dijalankan secara berimbang. Fungsi pelayanan harus dipertahankan untuk memastikan respons cepat saat bencana, sementara fungsi pemberdayaan perlu diperkuat melalui peningkatan fasilitas, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Sinergi antara keduanya akan menciptakan masyarakat Bojongsoang yang lebih tangguh, mandiri, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris, S. T. (2023). Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisiasi Kebijakan Untuk Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 314–324.
- Aning Haryati, J. A. (2023). *Dinamika Risiko Banjir: Studi Kasus Kota Bandung Dengan Pendekatan Geospasial*. Sumedang: MEGA PRESS NUSANTARA.
- Aprilia Fitri Pamungkas, W. H. (2024). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir Pekalongan melalui Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 81–96.

- Arjuna Yahdil Fauza Rambe, L. D. (2020). Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan dan deret. *AXIOM: Jurnal Pendidikan Dan Matematika*, 175-187.
- Asrulla, R. M. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 26320-26332.
- Fiantika, F. R. (2022). *"Metodologi penelitian kualitatif."* Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. Surabaya: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Melianita, R. A. (2021). Analisis Potensi Kerentanan dan Risiko Bencana di Wilayah Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain (JRSDD)*, 9.3.
- Muhamad Firman Al Halik, L. S. (2022). Analisa Data Untuk Prediksi Daerah Rawan Bencana Alam Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma K-Means Clustering. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 856-870.
- Nikmah, K. (2023). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan pada Mata Kuliah Studi Arsip untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 26-33.
- Ritonga, A. (2024). Tinjauan Kebijakan: Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan Bencana di Desa Ciwangi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 102-127.
- Siti Romdona, S. S. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 39-47.
- Sitti Hadhira Khairina, A. H. (2024). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Konteks Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kota Makassar. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 107-128.
- Sugeng Yulianto, R. K. (2021). Histori bencana dan penanggulangannya di indonesia ditinjau dari perspektif keamanan nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 180-187.
- Sunarto, H. S. (2024). Mewujudkan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat. *Perguruan Tinggi Siaga Bencana: Mewujudkan Kampus Aman dan Tangguh*, 81.
- Turniningtyas Ayu Rachmawati, D. R. (2018). *Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Tata Ruang*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ubay Haki, E. D. (2024). Strategi pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif pendidikan. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan*, 1-19.
- Urbanus, A. R. (2021). Mitigasi bencana banjir struktural dan non-

struktural di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Spasial*, 447-458.

Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023) (pp. 1148-1160). Atlantis Press.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, I. A. (2023). Collaborative Governance on Mangrove Rehabilitation by Indralayang Village and PT. PLN West Java at Karang Modang. *In 3rd International Conference on Law,*

Yunus Aris Wibowo, L. R. (2019). Perencanaan Mitigasi Bencana Banjir Non-Struktural Di Daerah Aliran Sungai Comal Hilir, Jawa Tengah. *JPIG (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*,, 87–100.